

Wagub NTB : UMKM dan Industri Perhotelan Jalin Kemitraan Untuk Sambut MotoGP

Syafruddin Adi - NTB.INDONESIASATU.CO.ID

Dec 24, 2021 - 01:22

Image not found or type unknown



Mataram NTB - Menjelang event bergengsi dunia MotoGP tahun 2022, Wakil Gubernur (Wagub) NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, mendorong UMKM dan pengusaha perhotelan atau industri perhotelan maupun restoran di NTB untuk menjalin Kerjasama dan kemitraan dalam memasarkan produk unggulan.

“Hal yang paling penting, produk UMKM kita dapat terserap secara konkrit,”kata Ummi Rohmi sapaan akrab Wakil Gubernur, pada saat menerima audiensi Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI, Rabu (22/12/2021) di ruang kerja Wagub.

Sehingga, produk UMKM juga harus memperhatikan kualitas maupun kuantitas produknya. Baik dari segi ketersediaan bahan baku, intensitas dan kontinuitas produk dan kemasan prodaknya. Intinya yang telah di Kurasi melalui proses penyeleksian terhadap produk yang akan dipasarkan sesuai dengan standarisasi.

Proses Kurasi ini sangat penting, bagi industri perhotelan dan restoren sehingga produk UMKM layak untuk dipasarkan atau digunakan ditempat tersebut. “Apalagi potensi yang kita miliki di NTB cukup berlimpah. Untuk dikembangkan dan dimanfaatkan oleh UMKM,” ujar Ummi Rohmi sapaan Wagub, didampingi Kadis Pariwisata Provinsi NTB.

Karena perhotem juga membutuhkan bahan dan produk UMKM lokal untuk melengkapi kebutuhan hotel. Seperti sabun, shampo, kopi, the dan bahan sembako untuk konsumsi harian pengunjung hotel.

Selain itu, Wagub juga menekankan UMKM, industri perhotelan dan jasa travel atau jasa pariwisata untuk lebih banyak mempersiapkan paket wisata. Karena pada saat MotoGP akan banyak pengunjung yang tidak hanya menonton MotoGP, namun membutuhkan atraksi dan hiburan serta destinasi yang lain di NTB.

“Ini membutuhkan sinergi dan kolaborasi, termasuk pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, untuk memperhatikan paket wisata sebagai peluang ekonomi bagi masyarakat,”pesan Wanita yang pernah mengenyam pendidikan S3 di Universitas Negeri Jakarta ini.

Hal lain juga yang harus menjadi perhatian, adalah ketersediaan Hotel-hotel dan penginapan. Baik itu jumlah kamar hotel maupun homestay untuk pengunjung yang 10 kali lebih besar dari pengunjung WSBK. Begitupun penerapan Prokes Covid-19 harus diperhatikan, karena pandemic belum berakhir.

“Saat ini saja ketersediaan 16.000 kamar baik dihotel dan homestay di NTB, khususnya dipulau Lombok, masih kurang, maka harus di dorong penambahan homestay, penginapan alternatif dan lainnya,”tandas mantan ketus DPRD Lotim dihadapan Kadis Pariwisata NTB.

Sementara itu, Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf RI, Fadjar Hutomo mengatakan bahwa gelaran MotoGP harus memiliki efek dan pengaruh besar terhadap kunjungan wisata di NTB dan Indonesia pada umumnya.

“Sehingga kita dapat mendapatkan manfaat ekonomi dari kegiatan ini. Kebermanfaatannya untuk masyarakat, itu yang paling penting,” kata Sarjana

Teknik Industri Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)

Terutama, yang sedang pihaknya tekankan terkait rantai pasok dan peran serta dan keterlibatan masyarakat atau UMKM lokal untuk ambil bagian dalam persediaan potensi produk dan bahan lainnya. Diakuinya bahwa berbicara rantai pasok untuk persediaan perhotelan, usaha restoran dan lainnya melibatkan kepentingan dan kebijakan multi pihak.

“Baik itu industri, UMKM, perdagangan, pertanian, perkebunan, peternakan dan pihak lain untuk bersinergi dan berkolaborasi,”ucapnya.

Untuk itu, perhotelan dan UMKM dan semua pihak dapat menjalin kemitraan dan Kerjasama. Contoh, sebuah hotel setiap hari membutuhkan bahan sembako, seperti beras, ikan, daging, telur, sayur, buah untuk kebutuhan konsumsi pengunjung hotel.

“Maka, penting kemitraan dan Kerjasama dengan UMKM lokal untuk memasok bahan sembako ini. Begitupun bidang transportasi atau rencar, sehingga ekonomi kita bergeliat,” jelas Ketua Asosiasi Perusahaan Modal Ventura Daerah Seluruh Indonesia.

Hal ini juga berkaitan dengan pariwisata berkelanjutan. Artinya bukan hanya persoalan lingkungan namun ada 4 pilar tata kelola, yang pertama destinasi dan ekosistem, kedua ekonomi lokalnya, ketiga sosial budaya lokal dan keempat baru berbicara lingkungan.

“Rumah besar inilah yang menjadi payung kita,” terang pria yang memiliki kompetensi bidang perencanaan keuangan dan konsultan UKM.(Adbravo)